

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH  
BERDASARKAN *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH  
KOTA PAREPARE**

**FRANSISCO VALDINO R  
A031191002**



**Kepada  
DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## **ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH KOTA PAREPARE**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FRANSISCO VALDINO R  
A031191002**



Kepada  
**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH KOTA PAREPARE

disusun dan diajukan oleh

**FRANSISCO VALDINO R**  
**A031191002**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 24 Januari 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. Haliah, SE., M.Si., Ak., CA., CWM., CRP., CRA.  
NIP 196507311991032002

Pembimbing II

Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP 196811251994122002



Dr. Syarifuddin Rasvid, S.E., M.Si.  
NIP 196503071994031003

## SKRIPSI

### ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH KOTA PAREPARE

disusun dan diajukan oleh

**FRANSISCO VALDINO R**  
**A031191002**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 6 April 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Haliah, SE.,M.Si. Ak., CA., CWM., CRP., CRA.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Aini Indrijawati, SE.Ak., M.Si.CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, C	Anggota	3..... 
4.	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP  
NIP 196503071994031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fransisco Valdino R  
NIM : A031191002  
Jurusan/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH KOTA PAREPARE**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 23 Januari 2023

buat pernyataan



Fransisco Valdino R

## PRAKATA

Segala Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir unruk mencapai gelar sarjana pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti Marcelus Ruruk, S.E dan Deni R. Manting, adik Regina dan Gideon, serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan doa selama ini.
2. Ibu Prof. Dr. Haliah, SE.,M.Si. Ak., CA., CWM., CRP., CRA selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE.Ak., M.Si.CA selaku Pembimbing II atas waktu dan ketulusannya dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS, C selaku penasehat akademik serta penguji peneliti dan Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A. selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP selaku Ketua Departemen Akuntansi dan ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu/Bapak dosen, pegawai, dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan, pengalaman serta buntu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

6. Novita Putri Tesalonika yang telah mendukung penulis dalam setiap tahapan penyelesaian penelitian ini.
7. Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KMK-FEB UH) , Trauzer Klasse, dan teman-teman *My trip My Funny Adventure* atas pengalaman, dukungan dan keceriaan yang luar biasa.
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA FEB UH), Kamerad, 19nite dan Eni sebagai tempat bagi peneliti untuk mengembangkan diri dan berorganisasi.
9. Keluarga besar beasiswa Pemapan Bhumiksara atas program pembinaan yang telah m dan makna akan Integritas, Unggul, Inklusif, Belarasa, dan Pelayanan.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan di Universitas Hasanuddin terlebih dalam proses penyusunan skripsi ini

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

Makassar, 23 Januari 2023

Fransisco Valdino R

## ABSTRAK

### **Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Kota Parepare**

### ***Analysis of Government Performance Measurement Based on Value for Money in Parepare City Government***

Fransisco Valdino R

Haliah

Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kota Parepare dengan menggunakan analisis Value for Money. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan sampel yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran tahun 2019-2021 yang dipublikasikan di website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Parepare. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Rasio ekonomi mencapai 90%, 98%, dan 87% sehingga secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Parepare termasuk dalam kategori ekonomi. Rasio efisiensi selama tahun 2019 – 2021 adalah 95%, 101%, dan 102%. Pada tahun 2020 dan 2021 rasio tersebut termasuk kategori tidak efisien karena berada pada persentase di atas 100%. Sedangkan rasio efektivitas menunjukkan 95%, 103%, dan 88%. Artinya pada tahun 2019 dan 2021 rasio tersebut termasuk kategori tidak efektif karena persentase rasionya dibawah 100%.

**Kata Kunci:** Kinerja, Value for Money, Ekonomis, Efisien, Efektif

*This study aims to determine the performance of the Parepare City Government by using the Value for Money analysis. The population in this research is financial reports and the sample used is the 2019-2021 budget realization report published on the Parepare Information Management and Documentation Officer (PPID) website. The data analysis technique used is the analysis of economic ratios, efficiency, and effectiveness. The results of this study show that: Economic ratio gets 90%, 98%, and 87% so the overall performance of the Municipal Government of Parepare is the economical category. The efficiency ratios during 2019 – 2021 were 95%, 101%, and 102%. In 2020 and 2021 the ratio was inefficient category because it was in percentage above 100%. While the effectiveness ratio shows 95%, 103%, and 88%. It means in 2019 and 2021 the ratio was ineffective category because of the percentage ratio below 100%.*

**Keyword:** Performance, Value for Money, Economic, Efficiency, Effectiveness

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II .....	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Kinerja .....	11
2.1.2 Pengukuran Kinerja .....	12
2.1.3 Indikator Kinerja.....	14
2.2 Value for Money .....	15
2.1.4 Teori Stewardship.....	16
2.2.1 Indikator Value for Money .....	17
2.2.2 Manfaat Implementasi.....	18
2.2.3 Langkah-Langkah Pengukuran Value for Money.....	18
2.3 Penelitian Terdahulu .....	22
2.4 Kerangka Pemikiran.....	26

BAB III .....	28
3.1 Rancangan Penelitian .....	28
3.2 Tempat dan Waktu .....	28
3.3 Populasi dan Sampel .....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6 Teknik Analisis Data .....	30
BAB IV .....	32
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	32
4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis .....	32
4.1.2 Arti Lambang Kota Parepare .....	33
4.1.3 Visi dan Misi Kota Parepare .....	34
4.2 Hasil Analisis <i>Value for Money</i> .....	39
4.2.1 Rasio Ekonomi .....	39
4.2.2 Rasio Efisiensi .....	41
4.2.3 Rasio Efektivitas .....	42
4.3 Pembahasan .....	43
4.3.1 Rasio Ekonomis .....	43
4.3.2 Rasio Efisiensi .....	45
4.3.3 Rasio Efektivitas .....	48
BAB V .....	62
PENUTUP .....	62
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	63
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	69

## Daftar Tabel

Tabel		Halaman
1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	5
1.2	Belanja Daerah.....	7
2.1	Penelitian Terdahulu.....	20
4.2	Rasio Ekonomis 2019 - 2021.....	40
4.3	Rasio Efisiensi 2019 - 2021 .....	41
4.4	Rasio Efektivitas 2019 - 2021 .....	43

## Daftar Gambar

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	25
4.2 Grafik Rasio Ekonomis .....	44
4,3 Grafik Rasio Efisiensi .....	47
4.4 Grafik Rasio Efektivitas .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemberian Hak otonomi terhadap beberapa daerah yang ada di Indonesia memberikan suatu kebebasan dalam hal pengelolaan dan upaya meningkatkan sumber pendapatan. Adapun tujuan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan meminimalisir ketergantungan fiskal pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di daerah tersebut. Tingginya realisasi pendapatan suatu daerah akan memberikan pandangan yang baik terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari hasil yang diperoleh. Maka dari itu dalam merespon kondisi ini masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk berpikir kritis atas kinerja pemerintah daerah (Nindy, 2014). Kinerja pemerintah saat ini tak lepas dari pengaruh hak otonomi yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

Hak otonomi yang luas dan desentralisasi, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam melakukan proses pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada kepentingan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 4 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Alayyal, 2014)

Organisasi bisnis atau non bisnis tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Salah satu faktor yang berperan bagi tercapainya tujuan itu ialah kinerja. Keberhasilan suatu kinerja dapat dinilai dari pencapaian indikator yang telah

ditetapkan dan menjadi standar bagi suatu organisasi (Wardiman, 2018). Kinerja berperan penting terhadap kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuannya maka dari itu penting bagi setiap organisasi khususnya organisasi sektor publik untuk melakukan pengembangan terhadap kinerjanya .

Saat ini Kinerja instansi pemerintah sering menjadi sorotan. Hal ini disebabkan oleh tingginya kesadaran masyarakat terhadap proses penyelenggaraan administrasi publik. Instansi pemerintah dinilai sering mengalami inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu mengalami kerugian (Demi, 2014:1) Melalui indikasi tersebut tentunya kinerja di lingkup pemerintahan perlu melakukan perkembangan. Selain itu instansi pemerintah juga perlu mewujudkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 dimana setiap instansi pemerintah diharapkan mampu menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

*Good governance* khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk akuntabilitas publik oleh lembaga lembaga sektor publik. Dalam lingkup birokrasi pemerintah, akuntabilitas merupakan suatu konsep yang digunakan dalam memperlihatkan serta menjelaskan pencapaian misi suatu organisasi. Secara eksistensi, organisasi pemerintah dirancang untuk dapat memenuhi kepentingan publik (Sawir, 2017) Selain itu dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik merupakan bentuk pemberian informasi kepada publik yang menjadi pemangku 2 kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2007: 9).

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting dalam suatu organisasi khususnya untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja diperlukan untuk dapat menilai akuntabilitas suatu organisasi dalam hal pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik

memiliki 3 tujuan. Pertama, adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Artinya bahwa pengukuran kinerja diperuntukan untuk membantu pemerintah pada pencapaian tujuan serta sasaran program unit kerja. Berdasarkan tujuan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam hal pelayanan publik. Kedua, pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dan juga dapat membantu proses pengambilan keputusan. Ketiga, adalah untuk memanifestasikan pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

Pengukuran kinerja dapat dinilai secara objektif dengan menggunakan metode yang terintegrasi dan mencakup input, output, dan outcome. *Value for Money* merupakan dasar pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari apa yang dihasilkan saja (*output*), namun juga mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for Money* adalah konsep dalam proses pengelolaan organisasi sektor publik yang berlandaskan pada tiga elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002:4) Ekonomi berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Demi, 2014:4)

Implementasi konsep *value for money* (VFM) penting terhadap pemerintah sebagai yang berfungsi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi konsep tersebut dapat memberi manfaat untuk menilai: 1) efektivitas dalam pelayanan publik, 2) mutu pelayanan publik, 3) Pengalokasian belanja yang berorientasi pada kepentingan publik, dan 4) meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik (Mardiasmo,2000). Nilai

anggaran dan realisasi belanja serta anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur *value for money* (Deby, 2020)

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait analisis kinerja berdasarkan Value for Money seperti penelitian Zain, Wardiman (2018) *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng* yang menggunakan seluruh Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2012-2016 sebagai populasi dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantaeng tahun 2012- 2016 sebagai sampel yang diambil melalui purposive sampling. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 ekonomis dan efisien karena memiliki rata-rata rasio ekonomi dibawah 100% yaitu 93,91%. rata-rata rasio efisiensi 96,85%. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2012-2016 yaitu 96,05% yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012- 2016 tidak efektif.

Nindy, C. F. (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)* menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Sumenep berada pada kategori ekonomis. Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 selalu mengalami peningkatan dan berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektivitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 tidak efektif hanya sebesar 99,95 % dan kurang dari 100%, namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 100,84 %, 101,21 % dan 101, 28 % dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif.

Selain itu, penelitian Khikmah, A. (2014) membahas terkait Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan konsep *Value for Money*. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2009 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%, artinya pemerintah kurang sukses dalam mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga terjadi pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Dilihat dari efisiensi dan efektivitas, kinerja pemerintah telah efisien dan efektif. Hal ini berarti pemerintah telah mampu mengelola sumber daya keuangan.

Kota Parepare memiliki begitu banyak potensi yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah dari berbagai sektor. Salah satu pendapatan terbesar kota Parepare adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sepanjang tahun 2019-2021 Kota Parepare terus mengalami kenaikan dalam hal memperoleh Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2021**

<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
TOTAL PAD	Rp 137.892.127.358,78	Rp 161.232.039.033,81	Rp 162.938.706.374,00
a. Pajak Daerah	Rp 33.921.012.865,90	Rp 32.601.904.835,70	Rp 36.288.891.979,65
b. Retribusi Daerah	Rp 7.491.169.079,00	Rp 5.869.616.961,00	Rp 5.714.865.423,21
c. Bagian Laba Usaha Daerah	Rp 6.935.032.137,00	Rp 8.670.545.436,00	Rp 9.122.099.569,00
d. Lain-lain Pendapatan	Rp 8.954.491.327.688,00	Rp 114.089.971.801,11	Rp 111.812.849.402,14

Sumber : PPID Kota Parepare

Tahun 2019 Kota Parepare mengalami kenaikan PAD sebesar 3% kemudian di tahun 2020 PAD Kota Parepare meningkat sekitar 14% dan pada tahun 2021 PAD Kota Parepare Kembali mengalami kenaikan senilai 1%. Fenomena kenaikan jumlah PAD Kota Parepare merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pengelolaan sumber keuangan serta memanfaatkan potensi pendapatan yang dimiliki.

Besarnya pendapatan yang dimiliki Kota Parepare perlu berbanding lurus dengan kinerja keuangan Pemerintah Kota Parepare dalam mempertimbangkan faktor ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Namun permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan APBD adalah pemborosan dalam penggunaan anggaran belanja yang tidak tepat sasaran sehingga manfaatnya tertunda bagi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, proyek pembangunan Masjid Terapung BJ Habibie yang mengalami keterlambatan target penyelesaian. Proyek yang memiliki anggaran Rp14 Miliar dari Pemkot Parepare ini harusnya rampung pada tanggal 31 Desember 2021 namun hingga pada Agustus 2022 pembangunan Proyek Masjid ini baru sampai pada tahap 2. Akibat dari keterlambatan ini pihak Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Kota Parepare memberikan denda keterlambatan senilai Rp2.830.630.216 dari tahun 2021 hingga Mei 2022. Denda keterlambatan ini tidak hanya untuk proyek pembangunan Masjid saja melainkan juga untuk pembangunan Anjungan Cempae yang mengalami keterlambatan.

Keterlambatan penyelesaian proyek tersebut tentunya tidak memberi manfaat apapun bagi warga kota Parepare karena proyek tak kunjung dapat digunakan. Hal ini berpotensi menyebabkan realisasi penggunaan anggaran tidak dapat mencapai target yang ditetapkan sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana yang ekonomis dan efektif sering tidak tercapai.

Kenaikan PAD yang dialami Kota Parepare memudahkan dalam menyediakan anggaran belanja. Tercatat pada tahun 2019-2021 kebutuhan belanja Kota Parepare sebesar berikut.

Tabel 1.2

## Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 - 2021

BELANJA	2019	2020	2021
TOTAL BELANJA	Rp 922.493.643.546,00	Rp 842.126.679.069,00	Rp 881.422.316.432,00
Belanja Operasi	Rp 678.934.100.046,00	Rp 673.487.189.114,00	Rp 686.078.449.972,00
Belanja Modal	Rp 243.482.043.500,00	Rp 165.584.127.455,00	Rp 190.353.985.886,00
Belanja Tak Terduga	Rp 77.500.000,00	Rp 3.055.362.500,00	Rp 4.989.880.574,00

Sumber : PPID Kota Parepare

Besarnya jumlah anggaran belanja Kota Parepare harus memperhatikan disiplin anggaran dalam setiap program yang dilaksanakan. Disiplin anggaran dapat menjadi suatu cara dalam mengatasi mencegah peningkatan drastis pencairan anggaran dan penuntasan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan (Nindy,2014)

Berdasarkan fakta dan latar belakang tersebut maka dari itu penulis melakukan suatu penelitian terkait ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH BERDASARKAN VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH KOTA PARE-PARE. Studi ini bermaksud untuk menyederhanakan penilaian kinerja sektor publik pada Kota Parepare dengan menggunakan konsep Value for Money yang berfokuskan pada prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Parepare periode tahun 2019-2021 ditinjau dari elemen ekonomi?
2. Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Parepare periode tahun 2019-2021 ditinjau dari elemen efisiensi?
3. Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Parepare periode tahun 2019-2021 ditinjau dari elemen efektivitas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk berikut ini.

1. Menguji dan menganalisis Kinerja Pemerintah Kota Parepare periode tahun 2019-2021 ditinjau dari elemen ekonomi.
2. Menguji dan menganalisis kinerja Pemerintah Kota Parepare periode tahun 2019-2021 ditinjau dari elemen efisiensi.
3. Menguji dan menganalisis kinerja Pemerintah Kota Parepare periode tahun 2019-2021 ditinjau dari elemen efektivitas.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan ke depannya akan bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu mengenai Kinerja Pemerintah Kota Parepare berdasarkan konsep *Value For Money*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi para akademisi yang nantinya ingin mengembangkan penelitian sejenisnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak pengguna laporan keuangan Pemkot Parepare dan memberikan informasi sekaligus *feedback* terkait pengukuran kinerja Pemerintah Kota Parepare sehingga dalam merencanakan dan melaksanakan program di masa depan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dengan uraian sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan ini pada dasarnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan proses peninjauan pustaka terkait teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini berisikan penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh kapabilitas personal, dukungan manajemen puncak, dan pengendalian internal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisikan mengenai kesimpulan hasil penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kinerja**

Kinerja adalah gambaran keberhasilan pengelolaan suatu organisasi yang hasilnya tercermin dalam suatu pencapaian organisasi. Menurut Moh Mahsun (2006), kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian setiap pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis organisasi.

Setiap organisasi, termasuk organisasi sektor publik, perlu mengetahui kinerja agar dapat melihat hasil pencapaiannya. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana publik untuk menghasilkan barang dan jasa publik. Sebagai organisasi yang menggunakan dana publik, masyarakat harus tahu bagaimana mengelola dana tersebut. Hasil pencapaian pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dari kinerja organisasi, oleh karena itu organisasi sektor publik harus melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan dengan mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan organisasi (Dewi, 2014).

Pada dasarnya organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi sektor swasta. Hal ini membuat organisasi sektor publik perlu menyesuaikan pengukuran kinerja yang dilakukan. Tujuan utama organisasi swasta adalah untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin bagi pemiliknya. Pada saat yang sama, keuntungan tidak menjadi prioritas dalam organisasi sektor publik, tetapi untuk memberikan layanan optimal dalam memenuhi kepentingan publik (Cahyono, 2000).

Kinerja hanya dapat diketahui bila seorang individu atau sekelompok orang memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Kriteria keberhasilan ini adalah tujuan yang dapat dicapai. Tanpa adanya tujuan atau maksud, kinerja seseorang atau suatu organisasi tidak dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

### **2.1.2 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah proses dalam menilai kemajuan pekerjaan terhadap tujuan yang telah ditentukan, termasuk informasi tentang: penggunaan sumber daya yang efisien dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan tujuan yang direncanakan; dan efektivitas kegiatan untuk mencapai tujuan Robertson (2002). Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengevaluasi realisasi kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Larry D Stout (1993) dalam Performance Measurement Guide (dalam Indra Bastian, 2006 : 275) "Pengukuran kinerja adalah proses pencatatan dan pengukuran pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai misi (mission accomplishment) melalui hasil yang terlihat seperti produk, jasa, atau layanan."

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk menilai implementasi strategi menggunakan alat ukur finansial dan non-finansial (Mardiasmo,200:121). Sistem pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai sarana pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan penetapan sistem reward dan punishment.

Menurut Mahsun, pengukuran kegiatan ekonomi daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Analisis anggaran Merupakan pengukuran kinerja yang dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya. Hasil yang didapat kurang lebih ada perbedaan. Metode ini berfokus pada kinerja kontribusi keuangan. Analisis didasarkan pada anggaran dan laporan pelaksanaan anggaran.
- b) Analisis Rasio Laporan Keuangan Pengukuran kinerja didasarkan pada perhitungan indikator keuangan seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio pasar. Rasio likuiditas mengukur kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio aktivitas mengukur efisiensi penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset tersebut. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hubungan pasar mengetahui pembentukan nilai organisasi (perusahaan) dalam kaitannya dengan nilai akuntansi organisasi (perusahaan). Analisisnya didasarkan pada neraca.
- c) Metode *Balanced Scorecard* Pengukuran kinerja didasarkan pada aspek finansial dan non finansial. Dimensi pengukuran meliputi empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan (pengguna), perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran-inovasi. Metode *Balanced Scorecard* banyak digunakan untuk mengukur kinerja sektor publik.
- d) Metode *Value for money* mengukur kinerja dari sisi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ekonomis dengan pengukuran efektivitas biaya. Efisiensi adalah tentang mengukur seberapa baik metode yang diterapkan dengan benar membandingkan input dengan output. Efisiensi mengacu pada pengukuran keakuratan pencapaian tujuan, yaitu. membandingkan hasil yang diinginkan dengan realisasinya.

### 2.1.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah variabel yang digunakan untuk menyatakan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi Lohman (2003). Oleh karena itu, jelaslah bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dengan menggunakan ukuran tertentu. Selain itu menurut Indra Bastian (2006:267), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts).

- a) Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- b) Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
- c) Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsionalitas keluaran kegiatan dalam jangka menengah (efek langsung).
- d) Indikator manfaat (benefits) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e) Indikator dampak (impacts) adalah dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2002 : 127) Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator

kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Menurut Mardiasmo (2002: 128), peran indikator kinerja pemerintah adalah sebagai berikut.

- a) Memperjelas tujuan organisasi
- b) Untuk mengevaluasi tujuan akhir yang dihasilkan (final outcome)
- c) Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial
- d) Memungkinkan pengguna jasa pemerintah untuk membuat pilihan,
- e) Menentukan standar kinerja
- f) Untuk menunjukkan efektivitas
- g) Membantu menentukan kegiatan yang memiliki efektivitas biaya terbaik untuk mencapai tujuan
- h) Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

## 2.2 Value for Money

Jurnal yang berjudul *Measuring the Impact and Value for Money of Governance & Conflict Programmes* (Chris Barnett, dkk.: 2010) mengutarakan:

*“VFM is about obtaining the maximum benefit over time with the resources available. It is about achieving the right local balance between economy, efficiency and effectiveness, or, spending less, spending well and spending wisely to achieve local priorities... VFM is high when there is an optimum balance between all three elements, when costs are relatively low, productivity is high and successful outcomes have been achieved.”*

Pendapat lain dikemukakan oleh Mardiasmo (2009: 4) *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, & efektivitas.

Ekonomi berkaitan terhadap hubungan antara pasar dan masukan (*cash of input*). Dalam hal ini ekonomi merupakan realisasi pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga yang terbaik sehingga dapat dimungkinkan tercapainya (*spending less*). Kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis Ketika mampu mengurangi segala biaya yang tidak perlu. Sehingga

pada hakikatnya terdapat pengertian yang selaras antara efisiensi dengan ekonomi, karena keduanya berorientasi pada penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*) (Mardiasmo 2018:165).

Efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas. Efisiensi diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan berdasarkan biaya output. Suatu proses kegiatan operasional dikatakan efisien jika suatu produk atau pekerjaan tertentu dapat diselesaikan dengan baik dengan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Efektifitas, adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Indra Bastian, 2006: 280). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi telah berjalan dengan efektif.

#### **2.1.4 Teori Stewardship**

Teori Stewardship dapat diterapkan untuk penelitian akuntansi di organisasi sektor publik seperti instansi pemerintah (Morgan et al., 1996). Pemerintah bertindak sebagai *steward* dengan melakukan fungsi pengelolaan, dan rakyat sebagai *principals* bertindak sebagai pemilik sumber daya.

Pemilik sumber daya (*principals*) mempercayakan pengelolaan sumber daya kepada pihak lain yang lebih mampu (*steward*). Kesepakatan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principals*) didasarkan pada kepercayaan yang selaras dengan tujuan organisasi. Pemerintah melakukan yang terbaik dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Penelitian ini menggunakan teori stewardship karena dalam organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan tanggungjawab pemilik kepercayaan (*steward*) yang

dalam hal ini adalah pemerintah kepada pihak pemberi kepercayaan (*principals*) yang memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20).

Pemerintah yang bertindak sebagai (*steward*) mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah (*principals*). Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (Pemerintah Kota Parepare) mengarahkan semua kemampuan dalam mengelola keuangan daerah untuk mencapai tujuan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

### **2.2.1 Indikator Value for Money**

Peranan indikator kinerja pada *Value for Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009: 130). Mardiasmo (2009) juga membagi indikator *Value for Money* menjadi dua, yaitu:

- a. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
- b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (*spending wisely*).

Peranan indikator kinerja pada *Value For Money* dapat dimanfaatkan oleh pihak internal sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

dalam pelaksanaan program yang masih perlu dilakukan perbaikan. Selain itu bagi pihak eksternal, indikator kinerja dapat menjadi informasi dalam menilai akuntabilitas publik serta mengidentifikasi masalah yang terindikasi.

### **2.2.2 Manfaat Implementasi**

Konsep *value for money* dalam mengukur kinerja pada organisasi sektor publik memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri dan masyarakat, yaitu manfaat ekonomis dalam hal pengadaan sumber daya, efisien dalam pengelolaan atau penggunaan sumber daya dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Mardiasmo (2017:7) disebutkan bahwa manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik ialah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik (tepat guna);
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
- e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Penerapan *value for money* dalam mengukur kinerja organisasi sektor publik sangat membantu instansi pemerintah dalam memberikan layanan yang ditargetkan kepada masyarakat dan menciptakan mutu layanan yang baik dengan menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien.

### **2.2.3 Langkah-Langkah Pengukuran Value for Money Pengukuran Ekonomi**

Pengukuran ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar.

Ekonomi merupakan suatu ukuran relatif sehingga pertanyaan yang sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah:

- a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Tolak ukur yang digunakan dalam analisis ini adalah:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Harga Input}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)(2.2)$$

Input: dana realisasi yang digunakan

Input value: dana anggaran yang dianggarkan

Kriteria ekonomi adalah:

Jika diperoleh nilai kurang dari  $\leq 100\%$  berarti ekonomis

Jika diperoleh nilai sama dengan  $100\%$  berarti ekonomi seimbang

Jika diperoleh nilai lebih dari  $\geq 100\%$  berarti tidak ekonomis.

### **Pengukuran Efisiensi**

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih efisien dibanding unit B, unit A lebih efisien tahun ini

dibanding tahun lalu, dan seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input
3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama.
4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output

Mardiasmo (2009: 133) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)(2.2)$$

Output: keluaran yang dicapai dari suatu kegiatan/program

Input: segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program,

Kriteria efisiensi adalah:

Jika diperoleh nilai kurang dari  $\leq 100\%$  berarti efisiensi

Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efisiensi seimbang

Jika diperoleh nilai lebih dari  $\geq 100\%$  berarti tidak efisiensi

Penyebut atau input sekunder sering kali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau output dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik. (Catatan efisiensi sering kali juga dinyatakan dalam bentuk input/output, dengan interpretasi yang sama dengan bentuk output/input, contoh biaya per unit output).

Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua (a) efisiensi alokasi (efisiensi 1), dan (b) efisiensi teknis atau manajerial (efisiensi 2) Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis (manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

### **Pengukuran Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar dari yang dianggarkan karena efektivitas hanya melihat apakah suatu program dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan

Teknik dalam melakukan pengukuran ini adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatam}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)(2.2)$$

Kriteria efektivitas adalah :

Jika diperoleh nilai kurang dari  $\leq 100\%$  berarti tidak efektif

Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas seimbang

Jika diperoleh nilai lebih dari  $\geq 100\%$  berarti efektif.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait analisis Value for money terhadap kinerja di organisasi sektor publik. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arfan, Demi Aulia. (2014)	Analisis Value For Money Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode tahun 2011 – 2012.	Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2011 telah menjalankan keseluruhan programnya dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis dibuktikan dengan adanya penghematan sebesar Rp141.626.730,00 dengan output yang cukup maksimal yaitu 99,29%. Efisien dibuktikan dengan program Peningkatan Kesejahteraan Petani memperoleh rasio efisiensi sebesar 122,1% dan efektif, yaitu program Peningkatan Ketahanan Pangan dan program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dengan rasio efektivitas keduanya mencapai 100%.
2	Khikmah, A. (2014).	Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten	Rasio ekonomis dari tahun 2009-2013 cenderung tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Dari segi efisiensinya

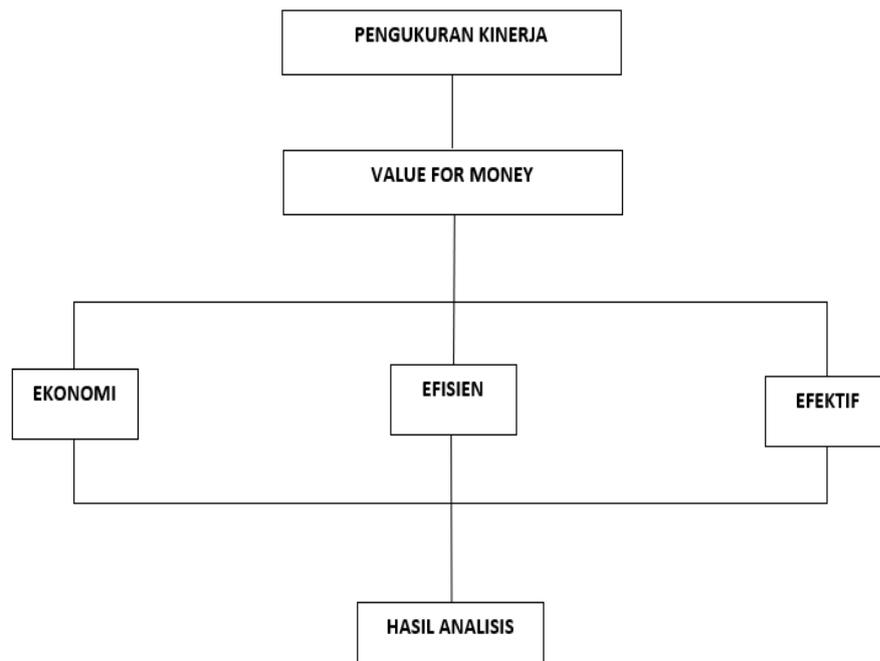
		lamongan berdasarkan konsep value for money (2011-2012)	cukup efisien karena rasio memperlihatkan hasil kurang dari 100%. Kemudian rasio efektif menunjukkan hasil yang lebih dari 100%, yang artinya bahwa pemerintah dalam menentukan target penerimaan telah sukses, dibuktikan dengan pemerolehan realisasi pendapatan yang lebih besar daripada anggaran pendapatannya.
3	Nindy, C. F. 2014.	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip <i>Value For Money</i> (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Rasio ekonomis Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 berada dalam kategori ekonomis 88, 2 %, 89,98 %, 89,77 % dan 90,68%. Sedangkan rasio efisiensi berada pada kategori efisien yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu rasio efektifitas hanya sebesar 99,95% di tahun 2010 setelah itu di tahun 2011-2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan hingga lebih dari 100% sehingga berada dalam kategori efektif.
4	Purwiyanti, D. (2017).	Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money	Analisis dari rasio ekonomi, Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah mampu menjalankan pekerjaan secara ekonomis.

		pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)	Sedangkan dari rasio efisiensi, Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah mampu menjalankan secara efisiensi. Kemudian dari rasio efektivitas, Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi tahun 2014 telah menjalankan keseluruhan pekerjaannya dengan efektif.
5	Zain, Wardiman (2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng	Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomi dibawah 100% yaitu 93,91%. Dari segi efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 yaitu efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi 96,85%. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2012-2016 yaitu 96,05% yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 tidak efektif.
6	Harmain, Hendra and Daulay,	Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada	Penelitian ini menunjukkan rasio ekonomis Pemerintah Kota medan yang mengalami penurunan, rasio efisiensi

	Aqwa Naser and Enre, Debby Tamara (2020)	Pemerintah Kota Medan (2014-2018)	belanja daerah mengalami peningkatan, rasio efektivitas pendapatan daerah mengalami penurunan, dan kinerja Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan <i>Value for Money</i> mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan daerah yang tidak maksimal namun disisi lain belanja daerah terus mengalami peningkatan.
7	Anggriani, A. E. (2021).	PENGARUH KINERJA KEUANGAN BERBASIS VALUE FOR MONEY (EKONOMI, EFISIENSI, DAN EFEKTIVITAS) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Sensus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Berdasarkan Value for Money (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) dan Alokasi Belanja Modal memiliki nilai yang fluktuatif. Ekonomis berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, Efisiensi dan Efektivitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Kinerja Keuangan Berdasarkan Value for Money (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini melibatkan Pemerintah Kota Parepare sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Parepare tahun 2019-2021 sebagai data yang akan dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Parepare menggunakan konsep Value for Money. Data yang diperoleh dari APBD dan Laporan Realisasi Anggaran kemudian akan dianalisis dan diukur berdasarkan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Parepare selama periode 2019-2021 dan kemampuan Pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan akuntabilitas. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat melalui gambar berikut.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**